



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

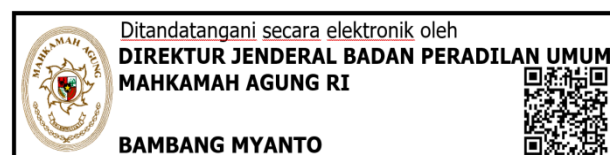
Nomor : 509/DJU/HM.02.3/6/2022 Jakarta, 6 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Segera
Hal : Perubahan batas waktu Penyelesaian Pengunggahan
Salinan Putusan Pidana bertanda tangan Elektronik

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
Ketua Pengadilan Negeri
di
tempat

Sehubungan surat kami Tanggal 3 Juni 2022 Nomor 499/DJU/HM.02.3/6/2022 Hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Pidana dan surat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Tanggal 3 Juni 2022 Nomor B.63/HK.00.01/6/2022 Hal Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama SPPT-TI (terlampir) yang menginformasikan bahwa tanggal penandatanganan MOU SPPT-TI oleh pimpinan Kementerian/Lembaga Instansi Penegak Hukum dan simulasi implementasi SPPT-TI dimajukan menjadi tanggal 21 Juni 2022, Maka batas waktu penyelesaian dan pengunggahan salinan putusan elektronik dimajukan menjadi tanggal **17 Juni 2022**.

Diharapkan seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana terlampir pada surat kami terdahulu di atas untuk memastikan bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 seluruh salinan putusan elektronik periode Desember 2021 sampai Mei 2022 telah diunggah pada aplikasi SIPP.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan :
1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Ketua Kamar Pidana
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 63 /HK.00.01/6/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Eks.
Hal : Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja
Bersama SPPT-TI.

Jakarta, 3 Juni 2022

Kepada Yth. :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung
2. Menkumham
3. Menkominfo
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas
5. Jaksa Agung
6. Kapolri
7. Ketua KPK
8. Kepala BSSN
9. Kepala Staf Presiden
10. Kepala BNN

Merujuk Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 sebelumnya didasarkan pada Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2021.
2. Atas hal tersebut, Kemenko Polhukam selaku Koordinator SPPT-TI telah memfasilitasi penyusunan Nota Kesepahaman dan PKB SPPT-TI yang hasilnya telah disetujui seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.
3. Sebagai informasi awal, penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKB SPPT-TI tahun 2022 akan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga, yang direncanakan pada tanggal 21 Juni 2022 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan :
Yth. Presiden RI.

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110